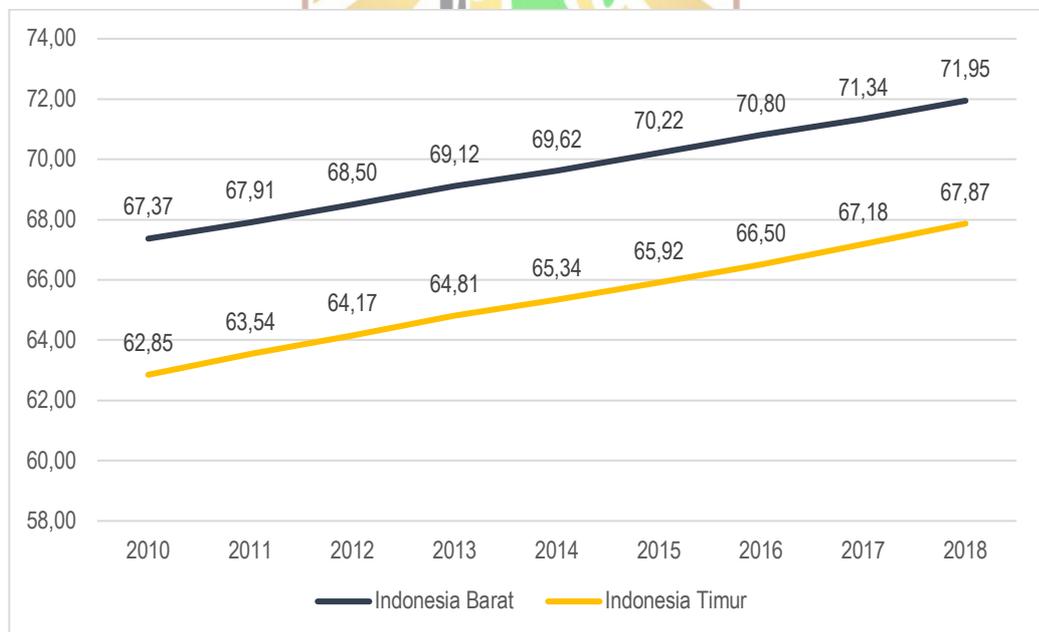


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang harus di hadapi negara khususnya negara berkembang pada abad ke-21 ini adalah bukan hanya semata masalah pertumbuhan ekonomi, tetapi masalah lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut yaitu masalah ketimpangan pembangunan manusia yang makin lama makin lebar (UNDP, 2020). Ketimpangan menurut UNDP diukur bukan hanya dari sisi pendapatan saja namun juga dari dimensi seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2018, Indonesia masuk kepada kategori pembangunan IPM tinggi dan berada pada peringkat 107 dari 189 negara dengan nilai skor indeks 0,718. Untuk wilayah ASEAN, Indonesia peringkat enam di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Secara tren, Indonesia terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Barat dan Timur Indonesia tahun 2010-2018

Sumber: BPS (2019)

Terlihat dari gambar 1, dari tahun 2010 hingga 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia. Di mana, terdapat selisih atau *gap* yang cukup lebar dan relatif konstan selama kurang lebih sembilan tahun. Secara umum, angka IPM Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2018 sama dengan angka IPM Kawasan Barat pada tahun 2010, artinya untuk mengejar pembangunan manusia Kawasan Barat, Kawasan Timur Indonesia butuh waktu sembilan tahun.

Jika dilihat sudut pandang ekonomi secara makro yang dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dibagi menjadi perpulau besar Indonesia, maka pulau Jawa merupakan pulau dengan *share* PDRB terbesar di Indonesia dengan *share* terhadap PDB Indonesia sebesar 61,5% pada tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019.

Tabel 1. PDRB Per Pulau di Indonesia tahun 2018 – 2019



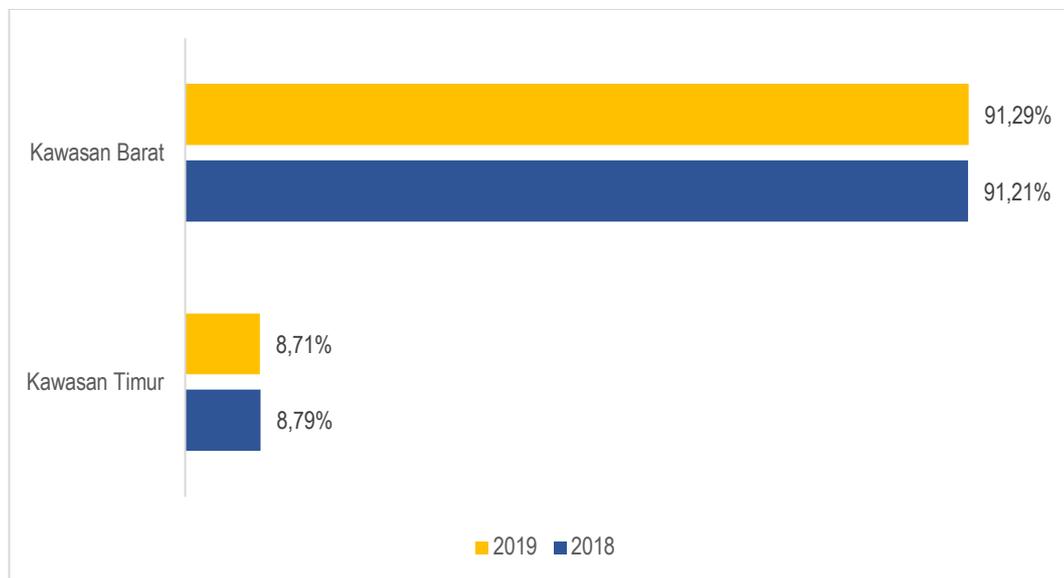
Pulau	Tahun		Share terhadap PDB	
	2018	2019		
Sumatera	3.227.944,12	3.413.326,83	21,5%	21,3%
Jawa dan Bali	9.210.319,55	9.942.170,76	61,5%	62%
Kalimantan	1.225.486,03	1.291.411,40	8,2%	8%
Sulawesi	947.679,02	1.036.971,65	6,3%	6,5%
Maluku dan Papua	369.761,05	359.701,10	2,5%	2,2%
Indonesia	14.981.189,77	16.043.581,74	100%	100%

Sumber : BPS (2020)

Setelah pulau Jawa, *share* PDRB paling banyak disumbangkan dari pulau Sumatera dan pulau Kalimantan berturut-turut 21,5% dan 8% pada tahun 2018 tetapi terjadi penurunan PDRB pada tahun 2019 di mana pulau Sumatera menjadi 21,3% dan pulau Kalimantan menjadi 8,0%. Selanjutnya diikuti oleh pulau Sulawesi dan pulau Maluku dan Papua berturut-turut 6,3% dan 2,5%. Artinya, jika Indonesia dibagi menjadi Kawasan Barat (Sumatera, Jawa, Kalimantan) dan Kawasan Timur (Nusa Tenggara Kepulauan, Pulau Sulawesi, Maluku Kepulauan, dan Papua) (Bappenas, 2018), sumbangan perekonomian Indonesia mayoritas

ditopang oleh kawasan barat Indonesia dengan *share* lebih dari 90% dan kawasan timur hanya 10%.

Secara lebih rinci, jika Indonesia dibagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat dan Kawasan Timur, maka Kawasan Barat Indonesia menikmati PDRB yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. Kawasan Barat menyumbangkan PDRB sebesar 91,21% pada tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 91,29 % secara nasional dan Kawasan Timur hanya 8,79% dan turun pada tahun 2019 menjadi 8,71%. Dari data tersebut, artinya sumbangan perekonomian hanya dinikmati oleh Kawasan Barat Indonesia saja dan Kawasan Timur menjadi semakin tertinggal.



Gambar 2. Share PDRB Kawasan Barat dan Timur Indonesia

Sumber: BPS (2020)

Masalah perbedaan pertumbuhan ekonomi tersebut juga ditentukan oleh berbagai aspek yang saling berpengaruh. Bappenas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) khususnya RPJMN III dan RPJMN IV merumuskan 7 agenda pembangunan yang secara garis besar menyinggung masalah kesenjangan ekonomi akibat pembangunan infrastruktur dan layanan yang masih berpusat di Kawasan Barat serta sumber daya manusia yang masih tertinggal baik skala nasional maupun skala internasional.

Masalah utama yang masuk ke dalam agenda perencanaan pembangunan Bappenas adalah masalah infrastruktur berbasis teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dan sumber daya manusia dimana hal tersebut adalah dua hal yang saling bersinggungan. Pembangunan infrastruktur meningkatkan peluang, secara langsung atau tidak langsung, bagi masyarakat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan memperoleh akses pendidikan dan serta layanan kesehatan dimana hal tersebut merupakan bagian dari pembangunan manusia (Kusharjanto dan Kim, 2011).

Banyak penelitian yang secara khusus melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan manusia saling berpengaruh. Kanagawa (2014) mencoba mengkaji hubungan antara infrastruktur dasar dalam hal ini akses listrik per rumah tangga dengan aspek sosio – ekonomi pada negara berkembang dimana dalam penelitian ini, India diambil sebagai lokus penelitian. Ditemukan bahwa akses listrik memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam semua aspek sosioekonomi di India. Akses listrik memberikan dampak positif dan memberikan kenaikan hingga 10% terhadap dimensi pendidikan. Kemudian penelitian dilakukan oleh Asongu and Le Roux (2017) dalam penelitiannya yang melihat bagaimana telekomunikasi dan informasi mempengaruhi indeks pembangunan manusia negara di negara-negara Afrika. Hasilnya, variabel telekomunikasi memberikan pengaruh yang signifikan dalam menaikkan indeks pembangunan manusia. Morawczynski (2007) melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan TIK terhadap pembangunan manusia di kawasan negara Afrika Barat. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan namun infrastruktur TIK tidak mempunyai dampak yang nyata terhadap pembangunan manusia.

A. Rumusan Masalah

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas fisik (jalan, bandara, pelabuhan, energi listrik dan bahan bakar, sistem komunikasi, pengairan dan sanitasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, energi dan layanan publik lainnya. Infrastruktur adalah kumpulan sumber daya dalam bentuk fasilitas dan layanan yang mendukung pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, pekerjaan dan kesejahteraan sosial (Jacoby, 2002).

Selain pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik yang tertuang dalam RPJMN IV, pembangunan infrastruktur juga mengikuti perkembangan pola industri menuju era industri 4.0. Era revolusi industri pada saat

ini menekankan kepada efektifitas dan efisiensi kegiatan perekonomian dan pelayanan sosial masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya, digital teknologi membantu proses pembangunan diberbagai aspek pembangunan manusia, diantaranya pendidikan dengan digitalisasi pendidikan, pemerintahan berbasis teknologi, inklusi keuangan melalui teknologi finansial dan pengembangan usaha mikro dan menengah melalui digitalisasi pasar (Bappenas, 2019). Setelah masuknya era Revolusi Industri 4.0, terjadi perubahan yang begitu pesat tentang masa depan dan peradaban manusia yang melibatkan setiap dimensi kehidupan salah satunya dalam memenuhi kebutuhan manusia (Elfindri, 2019). Untuk mengukur capaian pembangunan TIK tersebut BPS melakukan pencatatan terhadap indeks pembangunan TIK sejak tahun 2015.

Tabel 2. Persentase Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Infrastruktur	Kawasan Barat	Kawasan Timur
Rasio Panjang Jalan	6,19	7,38
Cakupan Listrik Terhubung	14,50	28,75
Cakupan Layanan Air Bersih	28,93	38,86
Indeks Pembangunan TIK	41,15	51,17

Sumber: BPS (2019), KemenPUPR (2019) (diolah)

Terdapat perbedaan yang signifikan kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia jika dilihat dari segi kenaikan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kurun lima tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Kawasan timur mendapat porsi pembangunan infrastruktur yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam agenda pembangunan pada RPJMN III Indonesia dimana pembangunan dimulai dari kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) untuk mengejar pemerataan pembangunan. (Bappenas, 2015)

Panjang jalan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diukur dengan melihat panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah provinsi per 1km², kenaikan kawasan timur Indonesia lebih besar yaitu mengalami kenaikan 7,38% dan kawasan barat hanya 6,19%. Sementara itu, persentase pembangunan listrik di kawasan timur mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan barat yaitu 28,75% berbanding 14,50%. Begitu juga

dengan cakupan layanan air bersih sebagai sarana dasar, pada kawasan timur Indonesia layanan air bersih dengan program pembangunan sambungan air kerumah-rumah mengalami kenaikan juga sebesar 38,86% dibandingkan dengan kawasan barat hanya 28,93%. Kemudian juga, sarana telekomunikasi dan informasi pada kawasan timur Indonesia juga telah memperoleh bagian yang lebih jika dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia di mana kawasan timur mengalami kenaikan pembangunan sarana prasarana TIK sebesar 51,17% sedangkan Kawasan Barat hanya 41,15%. Hal ini tentu dapat kita tafsirkan bahwa arah pembangunan dari 5 tahun terakhir memang dikhususkan kepada kawasan timur Indonesia agar dapat mendorong perekonomian dan terciptanya pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing sebagaimana tercantum dalam agenda RPJMN IV 2020-2024 (Bappenas, 2020).

Namun demikian, pembangunan infrastruktur dan masuknya era digitalisasi dan teknologi informasi yang sangat cepat dan digunakan dalam hampir semua aspek juga akan dapat membawa dampak negatif. Pembangunan infrastruktur yang tidak tepat guna akan menjadi pemborosan bagi keuangan negara. Sumber daya manusia yang tidak siap dalam menghadapi arus teknologi, pada akhirnya jumlah pengangguran akan meningkat pada suatu negara. Tentu saja hal ini akan menambah masalah baru pada suatu negara. Sehingga untuk menjawab era revolusi industri 4.0, *stakeholders* harus dapat menyesuaikan dan menggabungkan unsur teknologi dan sumber daya manusia sehingga setiap aspek dapat terpenuhi secara seimbang. Hal ini tentu menjadi masalah serius jika tidak segera diatasi dan pada akhirnya kesenjangan ekonomi akan semakin lebar antara Kawasan Timur dengan Kawasan Barat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur terhadap pembangunan manusia pada Kawasan Timur Indonesia sebagai daerah yang cukup tertinggal dari Kawasan Barat Indonesia sementara itu dalam lima tahun terakhir fokus pembangunan telah dilakukan diberikan porsi yang lebih pada kawasan timur Indonesia. Selanjutnya secara khusus, permasalahan penelitian di formulasikan menjadi beberapa pertanyaan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran dan kondisi pembangunan manusia pada kawasan timur Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia pada kawasan timur Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh infrastruktur dasar terhadap terhadap pembangunan manusia pada kawasan timur Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur TIK terhadap terhadap pembangunan manusia pada kawasan timur Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diungkapkan di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana gambaran kondisi pembangunan manusia pada kawasan timur Indonesia.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia pada kawasan timur Indonesia?
3. Menganalisis Bagaimana Pengaruh infrastruktur dasar terhadap terhadap pembangunan manusia pada kawasan timur Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pembangunan TIK terhadap terhadap IPM pada kawasan timur Indonesia?

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai kondisi pembangunan manusia di Indonesia serta dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi dimensi-dimensi pembangunan manusia khususnya pada kawasan timur Indonesia. Dengan informasi tersebut, hendaknya dapat menjadi alat ukur dalam pengambil keputusan dan sebagai alat penentu kebijakan oleh pemerintah dalam menentukan strategi pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan manusia di Indonesia sehingga sumber daya manusia yang ada khususnya pada kawasan timur Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang merata.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah ukuran pembangunan manusia yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia metode baru

dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks kesejahteraan sebagai parameter dengan menggunakan data sekunder dari BPS dan KemenPUPR. Masalah pembangunan manusia yang diangkat pada penelitian ini merupakan bagian dari masalah pembangunan manusia yang secara umum lebih besar, yaitu masalah yang menyangkut gender, pendidikan dan kesehatan usia dini, kesempatan bekerja, kondisi sosial politik, demografi, geografis dan lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima (V) Bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan, yang memuat materi bahasan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab dua berisi landasan teori. Pada bagian ini dikemukakan konsep dasar tentang landasan teori tentang Pembangunan Manusia, Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia, Kerangka Pemikiran, serta kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab Ketiga menguraikan Metode Penelitian yang memuat model empiris, variabel dan definisi variabel, data dan sumber data yang digunakan serta metode analisa yang digunakan pada penelitian ini.

Bab Empat membahas dan menjabarkan Hasil dan Pembahasan dari penelitian mengenai analisis pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia.

Pada bagian terakhir yaitu Bab Lima, berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi kebijakan dari hasil temuan dari penelitian ini.